



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NURYANI ZAINUDDIN
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 719623

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 7.139.395.506

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 720.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 49 m2/105 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 1.375.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 224 m2/157 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 2.805.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 68 m2/68 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.238.895.506

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 540.000.000

1. MOBIL, BMW X1 Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOBIL, TOYOTA COROLLA CROSS 1800 HYBRID A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
3. MOTOR, VESPA SPRINT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 20.000.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.472.287.315

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 9.171.682.821

III. HUTANG Rp. 865.111.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

8.306.571.821

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.